

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Hadikumsuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2005.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni. 1996.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013.
- Romli, Lili. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Ratnawati, Tri. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Yuswanto. *Pemekaran Kecamatan: Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing. 2014.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke IV Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.